

## **PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA**

**Nina Novitafiani**

*E-mail:* nina11188@yahoo.com

### **ABSTRACT**

This study aims to examine the influence of corporate social responsibility disclosure (CSRDI) on earnings management, either through discretionary accruals and real activities manipulation (RAM). This study uses proxy discretionary accruals to measure earnings management by using a measurement used by Kothari (2005). Earnings management through real activities manipulation can be detected by the abnormal levels of operating cash flows, discretionary expenditures, and production costs through Roychowdhury models (2006). CSR disclosure is measured by indicators that contained in the GRI G3.1 Guidelines. This study controls some of the factors that can also affect earnings management, such as the firm size, leverage, market-to-book value, growth, and auditors. The samples of this study are the high-profile industries that are listed on Indonesian Stock Exchange (ISE) in period 2012-2013. The data are taken from annual reports and financial statements of the companies. This study builds five different regression models to test the hypotheses. The hypotheses are tested by multiple linear regression analysis. This study proves that (1) the CSR disclosure negatively affect earnings management through discretionary accruals in companies that are classified as high-profile industry; (2) the CSR disclosure positively affect earnings management through abnormal levels of operating cash flows in companies that are classified as high-profile industry. However, this study fails to prove the influence of CSRDI on earnings man-

agement, either through abnormal production costs, abnormal discretionary expenditures, and combined measure of real activities manipulation.

**Keywords:** corporate social responsibility disclosure, earnings management, discretionary accruals, real activities manipulation, high-profile industries

**JEL Classification:** M14

### **PENDAHULUAN**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, untuk selanjutnya disebut TJSL, merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). TJSL merupakan suatu isu yang sedang berkembang dan pelaporannya menjadi sesuatu yang lazim dilakukan sebagaimana investor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya meminta transparansi yang lebih besar dalam semua aspek bisnis perusahaan (Kim *et al.*, 2012).

Pelaksanaan TJSL berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan dimana suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan *single bottom line*, yaitu faktor keuangan, melainkan juga harus berpijak pada *triple bottom line*. Dalam *triple bottom line*, aspek lain yang dinilai adalah aspek sosial dan

lingkungan, karena aspek ekonomi saja tidak cukup menjamin bahwa nilai perusahaan akan dapat tumbuh secara berkelanjutan (Elkington, 1998).

TJSL semula berkembang sebagai konsep moral perusahaan dan etika dunia bisnis. Gagasan TJSL ini tumbuh dari kesadaran perusahaan terhadap pentingnya perkembangan dan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Namun, konsep tanggung jawab moral yang bersifat sukarela ini telah berkembang menjadi kewajiban hukum ketika konsep tanggung jawab sosial itu dituangkan ke dalam sistem norma hukum. Saat ini telah dikeluarkan regulasi yang mewajibkan implementasi *corporate social responsibility* (CSR) dalam bentuk TJSL. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c UU No. 40 tahun 2007, dinyatakan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa TJSL adalah kewajiban bagi perusahaan sebagai bagian operasional bisnisnya dan harus menyisihkan sebagian anggaran perusahaan untuk melaksanakan program TJSL. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah ini merupakan salah satu bentuk tekanan politik dan perusahaan memiliki insentif untuk melakukan strategi yang dapat mengurangi dampak dari tekanan politik ini (Purwamitha, 2011). Berdasarkan teori kos politik dalam teori akuntansi positif, pengungkapan TJSL diekspektasi terjadi ketika adanya tekanan politik, sehingga manajer berupaya meminimumkan laba dilaporkan untuk mengurangi tindakan politik yang tidak menguntungkan perusahaan. Standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memberikan fleksibilitas bagi pihak manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi guna menyampaikan informasi mengenai kinerja perusahaan kepada pihak eksternal. Pemberian fleksibilitas ini membuka peluang untuk perilaku oportunistik yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba (Rahmawati, 2007). Dampak tindakan manipulasi laba antara lain adalah perusahaan akan kehilangan dukungan dari

para pemangku kepentingan (Prior *et al.*, 2008), akan meninggikan biaya modal dan menurunkan reputasi perusahaan (Ferrero *et al.*, 2013).

Teori keagenan menyatakan bahwa ada kepentingan yang berbeda antara pihak pemilik dan manajer yang memunculkan konflik yang dinamakan konflik keagenan pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham dan di sisi lain, manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri. TJSL dapat digunakan manajer untuk menghadapi konflik kepentingan ini untuk memaksimalkan tujuan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain yang memiliki kepentingan yang berbeda tersebut. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan TJSL lebih diharapkan untuk mengurangi kemungkinan perataan laba (Chih *et al.*, 2008) dan juga memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk melakukan manajemen laba melalui diskresioner akrual dan untuk memanipulasi aktivitas riil (Kim *et al.*, 2012).

Pelaksanaan praktik TJSL ini juga dapat digunakan oleh manajer perusahaan yang terlibat dalam perilaku oportunistik (Choi *et al.*, 2013). Salewski dan Zulch (2013) menemukan bahwa tren investasi atau pelaporan CSR perusahaan didorong oleh perilaku oportunistik yang salah satunya untuk tujuan menutupi tindakan manajemen laba. Prior *et al.* (2008) membuktikan bahwa manajemen yang melaksanakan program CSR juga melakukan praktik manajemen laba yang mengakibatkan memburuknya kinerja keuangan di masa depan. Program CSR digunakan sebagai strategi pertahanan diri (*entrenchment strategy*) manakala manajemen melakukan tindakan manajemen laba yang dapat merugikan kinerja keuangan jangka panjang.

Yip, Staden dan Cahan (2011) meneliti apakah pengungkapan CSR berhubungan dengan EM dan apakah hubungan ini diatasi atau dikurangi oleh pertimbangan kos politik atau oleh pertimbangan etika. Penelitian ini menemukan hubungan yang signifikan antara pelaporan CSR dan EM, yaitu hubungan negatif (komplementer) pada industri minyak dan gas dan hubungan positif (substitusi) pada industri makanan. Penelitian ini membuktikan bahwa hubungan CSR dan EM dipengaruhi oleh lingkungan politik dan bukan pertimbangan etika. Hasil yang berbeda untuk kedua industri ini mendukung pandangan bahwa

pertimbangan politik memiliki pengaruh lebih besar pada hubungan antara manajemen laba dan keputusan pengungkapan CSR dibandingkan pertimbangan etis. Selain itu, keputusan pelaporan CSR tampaknya dilakukan untuk menghindari pengawasan politik dan biaya yang mungkin timbul dari pengawasan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan TJSL terhadap manajemen laba, baik melalui akrual diskresioner maupun manipulasi aktivitas riil.

### MATERI DAN METODOLOGI PENELITIAN

Etika adalah sebuah cabang filosofi yang menyelidiki penilaian normatif tentang perilaku apa yang benar atau apa yang harus dilakukan (Brooks dan Dunn, 2010:142). Menurut *Encyclopedia of Philosophy*, etika didefinisikan dalam tiga cara, yaitu suatu pola umum atau cara hidup, suatu rangkaian peraturan tentang perilaku atau moral, penyelidikan tentang cara hidup dan peraturan perilaku (Brooks dan Dunn, 2010:143). Perilaku etis (*ethical behavior*) mengharuskan perusahaan untuk bertindak dengan cara yang dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan sebagai suatu perilaku yang adil dan jujur. Manajer perusahaan memiliki kewajiban untuk memperlakukan setiap kelompok pemangku kepentingan sesuai standar etika yang berlaku dengan jujur dan rasa hormat, serta mematuhi perjanjian atau kontrak yang telah dibuat.

Berdasarkan konsep *triple bottom line* (TBL) oleh Elkington tahun 1998, perusahaan harus melakukan tanggung jawab perusahaan yang mencakup 3 dimensi atau dikenal dengan 3P, yaitu mencapai keuntungan (*profit*), memberdayakan masyarakat (*people*), dan memelihara kelestarian alam (*planet*) demi tercapainya keberlanjutan perusahaan. Penerapan TJSL merupakan salah satu bentuk implementasi *triple bottom line*. *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat, baik dari segi bisnis maupun untuk pembangunan.

Dari definisi di atas, TJSL memiliki unsur *sustainability* (kesinambungan atau keberlanjutan), yaitu perusahaan melakukan tanggung jawabnya secara terus-menerus untuk efek jangka panjang. Perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk memberikan keuntungan bagi para pemegang saham dan untuk menjalankan bisnisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral, etis, dan filantropis terhadap para pemangku kepentingan, seperti karyawan, masyarakat setempat, investor dan regulator. Berdasarkan berbagai definisi tentang TJSL, dapat disimpulkan bahwa TJSL merupakan bentuk komitmen tanggung jawab perusahaan yang dibuat oleh manajemen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, lingkungan, maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya melalui kegiatan dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial perusahaan.

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan implementasi TJSL. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c UU No. 40 tahun 2007 dinyatakan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sebagai tindak lanjut dan penjelas dari UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menetapkan bahwa TJSL adalah kewajiban bagi perusahaan sebagai bagian operasional bisnisnya dan harus menyisihkan sebagian anggaran perusahaan untuk melaksanakan program TJSL.

Pada tanggal 1 Agustus 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor: X.K.6 lampiran Keputusan Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut mengatur kewajiban penyampaian laporan, bentuk dan isi laporan tahunan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Penyajian informasi mengenai tanggung

jawab sosial perusahaan dalam bagian tersendiri dan bahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di dalam laporan tahunan harus meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Penyajian informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan ini terkait aspek: lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; pengembangan sosial dan kemasyarakatan; dan tanggung jawab produk.

Dalam Undang-undang No. 25 tahun 2007 pasal 15 huruf b tentang Penanaman Modal, dinyatakan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam pasal 16 dinyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup (huruf d) dan menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja (huruf e). Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15, dalam Pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, serta pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

The Global Reporting Initiative (GRI) adalah jaringan organisasi non-pemerintah yang bertujuan mendorong keberlanjutan dan pelaporan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG). GRI mengeluarkan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang paling banyak dipergunakan di dunia dalam rangka mendorong transparansi yang lebih besar. Kerangka tersebut, bersama "Petunjuk G3.1", menetapkan prinsip dan indikator yang dapat dipergunakan organisasi untuk mengukur dan melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosialnya. Misi GRI adalah menjadikan pengungkapan kinerja di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial menjadi satu praktek umum.

Laba adalah salah satu angka kinerja yang paling sering dipakai oleh pemegang saham, pemasok, karyawan, pelanggan, masyarakat, dan regulator. Manajer dapat melakukan beberapa kebijakan dalam menghitung laba tanpa melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga menyebabkan laba yang dilaporkan menjadi lebih besar atau lebih kecil dari kenyataan (Prior *et al.*, 2008). Menurut Scott (2011:423), manajemen laba adalah pilihan manajer pada kebijakan akuntansi, atau tindakan nyata, yang

akan mempengaruhi laba sehingga dapat mencapai beberapa tujuan tertentu atas laba yang dilaporkan. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan *judgement* dalam pelaporan keuangan dan dalam penyusunan transaksi yang dapat mengubah laporan keuangan, sehingga dapat menyesatkan pemangku kepentingan terkait kinerja ekonomi perusahaan atau dapat mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi (Healy dan Wahlen, 1999).

Manajemen laba melalui akrual diskresioner. Dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan dicatat pada periode saat pendapatan tersebut diperoleh dan biaya yang terkait dengan pendapatan tersebut diakui pada periode yang sama, tanpa memperhatikan waktu penerimaan dan pengeluaran kas terkait dengan pendapatan yang dihasilkan. Konsep akrual terdiri atas akrual diskresioner (*discretionary accrual*) dan akrual nondiskresioner (*nondiscretionary accrual*). Akrual diskresioner merupakan komponen akrual yang dapat diatur sesuai dengan kebijakan (*discretion*) manajemen, sementara akrual nondiskresioner merupakan komponen akrual yang tidak dapat diatur sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan. Penjumlahan antara akrual diskresioner dan akrual nondiskresioner menghasilkan total akrual.

Prinsip akuntansi yang berlaku umum memungkinkan manajemen untuk menentukan beberapa kebijakan (*discretion*) yang dapat menyebabkan timbulnya manajemen laba atau perpindahan laba dari satu periode ke periode lain. Akrual yang dimaksud di sini adalah akrual yang tidak diharapkan (*unexpected accruals*). Untuk mengestimasi akrual yang tidak diharapkan, dimulai dengan total akrual, yaitu selisih laba bersih dan arus kas operasi. Akrual yang tidak diharapkan adalah komponen dari total akrual yang tidak dapat dijelaskan (residual). Contoh akrual yang dapat dipakai oleh manajemen adalah biaya depresiasi dan kerugian piutang. Manajemen dapat memilih metode akuntansi dalam perhitungan depresiasi dan memberikan *judgement* pada manajemen kebijakan piutang yang dapat mempengaruhi alokasi biaya dan pendapatan bersih perusahaan.

Manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Roychowdury (2006) menyajikan bukti manajemen laba melalui aktivitas operasional perusahaan. Menurut Roychowdury (2006), sejumlah

studi mendiskusikan kemungkinan bahwa intervensi manajerial dalam proses pelaporan dapat terjadi tidak hanya melalui estimasi dan metode akuntansi, tapi juga melalui keputusan operasional. Manipulasi aktivitas riil adalah penyimpangan dari praktik operasional normal, dimotivasi oleh keinginan manajer untuk menyesuaikan setidaknya beberapa pemangku kepentingan menjadi percaya tujuan pelaporan keuangan tertentu telah terpenuhi dalam kegiatan operasi normal. Penyimpangan ini tidak memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan walaupun memungkinkan manajer memenuhi tujuan pelaporan. Manipulasi aktivitas riil dapat menurunkan nilai perusahaan karena tindakan yang diambil di periode sekarang untuk meningkatkan laba dapat memiliki dampak negatif terhadap aliran kas di periode yang akan datang. Roychowdury (2006) menemukan bahwa manajer memberikan potongan harga untuk meningkatkan penjualan, melakukan produksi yang berlebihan untuk mengurangi *cost of goods sold* dan mengurangi pengeluaran diskresioner untuk meningkatkan laba yang dilaporkan.

Roychowdury (2006) meneliti tiga metode manipulasi laba melalui aktivitas riil, yaitu: 1) Manipulasi penjualan, yaitu usaha manajer untuk meningkatkan penjualan dengan menawarkan potongan harga atau persyaratan kredit yang lebih lunak. Peningkatan volume penjualan sebagai akibat dari diskon kemungkinan akan hilang ketika perusahaan mengembalikan harga lama. Arus kas masuk per penjualan, setelah dikurangi potongan harga, dari penjualan tambahan ini menjadi lebih rendah karena penurunan margin. Total laba di periode saat ini menjadi lebih tinggi karena adanya tambahan penjualan, dengan asumsi margin positif. Margin yang lebih rendah karena potongan harga menyebabkan kos produksi relatif terhadap penjualan menjadi tinggi secara abnormal. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa aktivitas manajemen penjualan ini dapat menyebabkan aliran kas operasi periode saat ini menjadi lebih rendah dan kos produksi periode saat ini menjadi lebih tinggi dibandingkan tingkat penjualan normal; 2) Pengurangan pengeluaran diskresioner. Pengeluaran diskresioner seperti penelitian dan pengembangan, periklanan dan pemeliharaan secara umum dibebankan pada periode yang sama ketika pengeluaran tersebut terjadi. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengurangi biaya yang dilaporkan, dan meningkatkan laba, dengan mengurangi pengeluaran

diskresioner. Jika pengeluaran diskresioner ini dalam bentuk tunai, pengurangan pengeluaran ini membuat arus kas keluar menjadi lebih rendah dan memiliki dampak positif terhadap arus kas operasi abnormal periode saat ini, namun dengan risiko arus kas yang lebih rendah di periode mendatang; dan 3) Produksi yang berlebihan, atau meningkatkan produksi untuk melaporkan *cost of goods sold* yang lebih rendah. Dengan tingkat produksi yang lebih tinggi, biaya *overhead* tetap disebar pada jumlah unit yang lebih besar, sehingga biaya tetap per unit menjadi lebih rendah. Sepanjang pengurangan biaya tetap per unit tidak diimbangi dengan peningkatan biaya marginal per unit, total biaya per unit menurun. Hal ini menyebabkan *cost of goods sold* yang dilaporkan menjadi lebih rendah dan perusahaan dapat melaporkan margin operasi yang lebih baik. Namun, perusahaan menghasilkan biaya persediaan dan penyimpanan pada item yang diproduksi berlebihan tersebut yang belum berhasil terjual di periode yang sama. Ini menyebabkan arus kas operasi lebih rendah dari normal. Biaya marginal tambahan yang terjadi pada produksi tambahan persediaan mengakibatkan biaya produksi tahunan yang lebih tinggi relatif terhadap penjualan.

Menurut Mulford dan Comiskey (2002: 16), kos politik adalah kos atas penambahan regulasi, termasuk pajak yang lebih tinggi, yang ditanggung oleh perusahaan besar dan perusahaan *high-profile*. Scott (2011:308) menyatakan bahwa salah satu hipotesis yang mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba berdasarkan Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*) yang diformulasikan oleh Watts dan Zimmerman (1986) adalah *The Political Cost Hypothesis*. Hipotesis ini menyatakan bahwa jika semua hal dianggap sama, semakin besar kos politik yang dihadapi perusahaan, semakin besar pula kemungkinan manajer memilih prosedur akuntansi yang menunda atau menanggulangi laba yang dilaporkan dari periode saat ini ke periode mendatang. Hipotesis kos politik memperkenalkan sebuah dimensi politis ke dalam pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan yang berhadapan dengan kos politik yang tinggi cenderung untuk menurunkan laba dengan tujuan untuk meminimalkan kos politik yang harus mereka tanggung. Kos politik dapat muncul karena profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. Ukuran perusahaan

juga dapat menyebabkan kos politik. Bila perusahaan besar tersebut juga memiliki profitabilitas tinggi, kos politik akan menjadi besar pula. Scott (2011: 312) menyatakan bahwa sehubungan dengan hipotesis kos politik, banyak penelitian empiris yang didasarkan pada ukuran perusahaan dan perusahaan besar lebih tunduk pada pengawasan politik. Perusahaan besar dan *high-profile* dapat memiliki motivasi untuk melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba dalam upaya untuk mengurangi perhatian dari regulator (Mulford dan Comiskey, 2002: 7).

Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa salah satu hal yang menjadi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba adalah motivasi peraturan (*regulatory motivations*). Healy dan Wahlen membagi motivasi ini ke dalam tiga bentuk, yaitu regulasi industri (*industry regulations*), *anti-trust* dan regulasi lainnya (*anti-trust and other regulations*), serta tujuan perencanaan pajak (*tax planning purposes*). Manajer perusahaan mendapatkan tekanan berupa peraturan atau regulasi dari berbagai pihak dan itu menciptakan insentif bagi manajemen untuk mengatur laporan keuangannya agar sesuai dengan kepentingan pihak regulator. Manajer perusahaan dapat menggunakan kebijakan akuntansi untuk mengelola tekanan atau paksaan akibat peraturan atau regulasi tersebut. Tekanan tersebut merangsang praktik manajemen laba sebagai siasat untuk memunculkan laba yang lebih sedikit (Watts dan Zimmerman, 1978 dalam Healy dan Wahlen, 1999).

Literatur etika menyatakan bahwa perusahaan bisa, dan harus, bertanggung jawab secara etis. Perusahaan yang menerapkan praktik TJSL demi memenuhi harapan etis para pemangku kepentingan memiliki kecenderungan untuk membatasi manajemen laba, sehingga memberikan investor informasi keuangan yang lebih transparan dan terpercaya (Kim *et al.*, 2012). Menurut perspektif etika, perusahaan yang melakukan TJSL dan melaporkan pengungkapan TJSL tersebut akan dapat mengurangi kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba (Yip *et al.*, 2011). Chih *et al.* (2008) menemukan bahwa perusahaan yang melaksanakan kegiatan TJSL lebih diharapkan dapat mengurangi kemungkinan perataan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Kim *et al.* (2012) juga menemukan hal yang serupa, yaitu perusahaan yang melakukan tanggung jawab secara sosial memiliki kecenderungan

yang lebih kecil untuk melakukan manajemen laba melalui diskresioner akrual maupun melalui manipulasi aktivitas riil. Dalam penelitian Kim *et al.* (2012) ini ditemukan bahwa berdasarkan motivasi etika, etika dapat memicu manajer untuk menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas tinggi. Pyo dan Lee (2013) juga meneliti hubungan antara kegiatan CSR dan kualitas laba. Penelitian ini menguji apakah kegiatan CSR didorong oleh motivasi integritas atau oportunistik. Temuan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR memiliki akrual diskresioner yang lebih rendah dan konservatisme akuntansi yang lebih tinggi, sehingga mempunyai kualitas laba yang lebih tinggi pula.

Di sisi lain, ada pula penelitian yang menemukan bahwa pelaksanaan praktik TJSL ini dapat digunakan oleh manajer perusahaan yang terlibat dalam perilaku oportunistik (Choi *et al.*, 2013). Prior *et al.* (2008) menggunakan sampel 593 perusahaan dari 26 negara dan membuktikan bahwa manajemen yang melaksanakan program CSR secara signifikan juga melakukan praktik manajemen laba yang mengakibatkan memburuknya kinerja keuangan di masa depan. Program CSR digunakan sebagai strategi pertahanan diri (*entrenchment strategy*) manajemen manakala manajemen melakukan tindakan manajemen laba yang dapat merugikan kinerja keuangan jangka panjang. Manajer dapat juga menggunakan suatu strategi pertahanan diri untuk mengantisipasi ketidakpuasan pemangku kepentingan ketika melaporkan kinerja perusahaan yang kurang memuaskan. Strategi pertahanan diri manajer tersebut sebagai upaya untuk tetap mempertahankan reputasi perusahaan dan melindungi karier manajer secara pribadi. Salewski dan Zulch (2013) meneliti hubungan antara CSR dan kualitas laba pada perusahaan yang menerapkan IFRS di Eropa dan menemukan bahwa tren investasi atau pelaporan CSR perusahaan didorong oleh perilaku oportunistik yang salah satunya untuk tujuan menutupi tindakan manajemen laba.

Hipotesis Kos Politik (*Political Cost Hypothesis*) memprediksi bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki visibilitas yang lebih besar di arena politik menjadi target menarik untuk transfer kekayaan yang dikenakan pemerintah, seperti perpajakan dan regulasi, sehingga perusahaan ini memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan yang lebih sukarela dalam

upaya untuk meminimalkan kos politik (Watts & Zimmerman 1986 dalam Yip *et al.*, 2011). Yip *et al.* (2011) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel 80 perusahaan di industri minyak dan gas dan 30 perusahaan di industri makanan dan minuman yang ada di Amerika Serikat untuk menguji apakah pengungkapan CSR berhubungan dengan EM dan apakah hubungan ini dikurangi berdasarkan pertimbangan *political cost* atau berdasarkan pertimbangan etika. Penelitian ini menemukan hubungan yang signifikan antara pelaporan CSR dan EM, yaitu hubungan negatif (komplementer) pada industri minyak dan gas dan hubungan positif (substitusi) pada industri makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan CSR dan EM dipengaruhi oleh lingkungan politik dan bukan pertimbangan etika. Prior *et al.* (2008) juga menemukan hubungan antara EM dan CSR yang lebih signifikan pada sektor yang sensitif secara politik (*politically-sensitive sectors*).

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian hubungan CSR dan EM sebelumnya yang beragam tersebut, peneliti menduga bahwa perspektif etika dan lingkungan politik mempengaruhi hubungan negatif antara CSR dan EM. Peneliti menduga, semakin banyak suatu perusahaan melakukan dan melaporkan pengungkapan TJSL, semakin kecil kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba. Penelitian ini mencoba menguji pengaruh negatif TJSL terhadap manajemen laba pada perusahaan yang memiliki kos politik yang tinggi dan sampel perusahaan yang diambil adalah perusahaan yang tergolong industri *high-profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti menduga, perusahaan pada industri *high-profile* lebih beretika dengan melakukan dan mengungkapkan TJSL lebih banyak dan mempunyai kecenderungan yang lebih kecil untuk melakukan manajemen laba. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1:** Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui akrual diskresioner pada perusahaan yang tergolong *high-profile*.

Tindakan perusahaan yang memanipulasi penjualan melalui potongan harga atau pun persyaratan kredit yang lunak akan menyebabkan arus kas operasi periode saat ini yang lebih rendah dibandingkan tingkat penjualan normal. Arus kas operasi abnormal yang tinggi mengindikasikan perusahaan tidak melakukan

manipulasi penjualan dan mengindikasikan pula perusahaan memiliki kebijakan pengambilan keputusan yang lebih konservatif atau menerapkan prinsip kehati-hatian (Kim *et al.*, 2012). Kim *et al.* (2012) menyatakan bahwa bila konsisten dengan hipotesis pelaporan keuangan transparan, skor CSR akan berhubungan positif dengan arus kas operasi abnormal (AB\_CFO). Oleh karena itu, peneliti menduga perusahaan pada industri *high-profile* lebih beretika dengan melakukan dan mengungkapkan TJSL lebih banyak dan mempunyai kecenderungan yang lebih kecil untuk melakukan manajemen laba melalui manipulasi penjualan. Hipotesis penelitian ini adalah:

**H2:** Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui arus kas operasi abnormal pada perusahaan yang tergolong *high-profile*.

Produksi abnormal yang rendah mengindikasikan perusahaan tidak melakukan produksi yang berlebihan untuk mengurangi pelaporan harga pokok penjualan dan mengindikasikan pula perusahaan memiliki kebijakan pengambilan keputusan yang lebih konservatif atau menerapkan prinsip kehati-hatian. Kim *et al.* (2012) menyatakan bahwa bila konsisten dengan hipotesis pelaporan keuangan transparan, skor CSR akan berhubungan negatif dengan produksi abnormal (AB\_PROD). Oleh karena itu, peneliti menduga perusahaan pada industri *high-profile* lebih beretika dengan melakukan dan mengungkapkan TJSL lebih banyak dan mempunyai kecenderungan yang lebih kecil untuk melakukan manajemen laba melalui produksi yang berlebihan. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H3:** pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui produksi abnormal pada perusahaan yang tergolong *high-profile*.

Pengeluaran diskresioner abnormal yang tinggi mengindikasikan perusahaan tidak melakukan pengurangan pengeluaran diskresioner untuk meningkatkan pelaporan laba dan mengindikasikan pula perusahaan memiliki kebijakan pengambilan keputusan yang lebih konservatif atau menerapkan prinsip kehati-hatian. Kim *et al.* (2012) menyatakan bahwa bila konsisten dengan hipotesis pelaporan keuangan transparan, skor CSR akan berhubungan positif dengan pengeluaran diskresioner abnormal (AB\_DISCRE). Oleh karena itu,

peneliti menduga perusahaan pada industri *high-profile* lebih beretika dengan melakukan dan mengungkapkan TJSL lebih banyak dan mempunyai kecenderungan yang lebih kecil untuk melakukan manajemen laba melalui pengurangan pengeluaran diskresioner. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H4:** pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui pengeluaran diskresioner abnormal pada perusahaan yang tergolong *high-profile*.

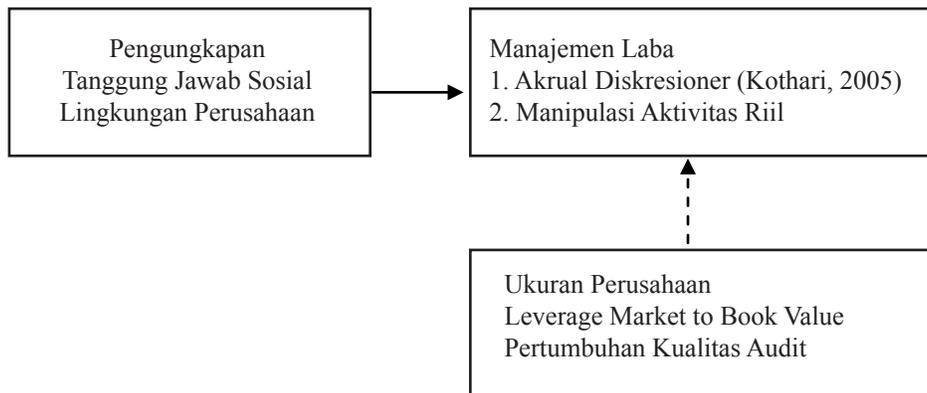
Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan ketiga proksi manipulasi aktivitas riil (RAM\_PROXY) dengan cara mengurangi arus kas operasi abnormal dengan produksi abnormal dan menjumlahkannya dengan pengeluaran diskresioner abnormal (AB\_CFO - AB\_PROD + AB\_DISCRE). Menurut Kim *et al.* (2012), semakin tinggi keseluruhan manipulasi aktivitas riil, semakin perusahaan memiliki keputusan operasi yang lebih konservatif atau menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengungkapkan TJSL cenderung tidak melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H5:** pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui kombinasi manipulasi aktivitas riil pada perusahaan yang tergolong *high-profile*.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan pengembangan hipotesis maka rerangka pemikiran teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Yip, Staden dan Cahan (2011) dengan menambahkan dua variabel kontrol, yaitu *market-to-book ratio* dan kualitas audit. Chih, Shen, Kang (2008) menemukan bahwa *market-to-book ratio* memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Menurut Chen *et al.* (2010), kualitas audit memainkan peranan penting pada penilaian perusahaan dan juga pada penahanan manajemen laba. Kualitas audit di sini adalah variabel *dummy*, yaitu 1 jika diaudit oleh KAP *big 4* atau 0 jika tidak (Pyo dan Lee, 2013).

Variabel dependen penelitian ini adalah manajemen laba yang terbagi menjadi dua, yaitu manajemen laba melalui akrual diskresioner dan manipulasi aktivitas riil. Pengujian manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kim *et al.* (2012). Kim *et al.* (2012) menyatakan bahwa perusahaan menggunakan manipulasi aktivitas riil sebagai alat alternatif untuk melakukan manajemen laba. Selain itu, sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergolong *high-profile* karena menurut Wang *et al.*, (2013), perusahaan yang tergolong *high-profile* memiliki kemungkinan menghadapi kos politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tergolong *low-profile*. Menurut Mulford dan Comiskey (2002: 16), kos politik adalah kos atas penambahan regulasi, termasuk pajak yang lebih tinggi, yang di-



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran**

tanggung oleh perusahaan besar dan perusahaan *high-profile*. Penelitian ini menggunakan penggolongan tipe industri sesuai dengan penggolongan yang telah dilakukan dalam penelitian Sembiring (2005), yaitu perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan komunikasi, kesehatan,

transportasi, dan pariwisata.

**HASIL PENELITIAN**

Uji t (parsial) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara individu atau parsial terhadap variabel dependen.

**Tabel 1**  
**Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji t**

Hipotesis	Predicted Sign	Signifikansi	Hasil
H1: Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui akrual diskresioner pada perusahaan yang tergolong <i>high-profile</i> .	-	0,012	Berhubungan negatif, signifikan
H2: Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui arus kas operasi abnormal pada perusahaan yang tergolong <i>high-profile</i> .	+	0,027	Berhubungan positif, signifikan
H3: Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui produksi abnormal pada perusahaan yang tergolong <i>high-profile</i> .	-	0,694	Berhubungan negatif, tidak signifikan
H4: Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui pengeluaran diskresioner abnormal pada perusahaan yang tergolong <i>high-profile</i> .	+	0,168	Berhubungan positif, tidak signifikan
H5: Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui kombinasi manipulasi aktivitas riil pada perusahaan yang tergolong <i>high-profile</i> .	+	0,457	Berhubungan positif, tidak signifikan

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 dan hipotesis 2 memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,012 dan 0,027. Tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (5%) ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 dan 2 diterima. Hipotesis 3, hipotesis 4, dan hipotesis 5 masing-masing memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3, hipotesis 4, dan hipotesis 5 ditolak.

**PEMBAHASAN**

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa pengungkapan TJSL perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui akrual diskresioner pada perusahaan yang tergolong *high-profile*. Hasil pengujian menunjukkan signifikansi sebesar 0,012, lebih rendah dari 0,05 (5%) dan nilai koefisien regresi CSRDI

sebesar -0,143. Hal ini berarti hipotesis pertama (H1) diterima dan terbukti bahwa pengungkapan TJSL perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui akrual diskresioner pada perusahaan yang tergolong *high-profile*. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan *high-profile* di Indonesia cenderung tidak melakukan manajemen laba melalui akrual diskresioner. Bukti empiris ini sejalan dengan penelitian Chih *et al.* (2008), Kim *et al.* (2012) dan Pyo dan Lee (2013) yang menemukan bahwa perusahaan yang melakukan tanggung jawab secara sosial memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk melakukan manajemen laba melalui akrual diskresioner. Bukti empiris ini juga sejalan dengan perspektif etika yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan TJSL dan melaporkan pengungkapan TJSL tersebut akan dapat mengurangi kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba (Yip *et al.*, 2011).

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa pengungkapan TJSL perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui arus kas operasi abnormal pada perusahaan yang tergolong *high-profile*. Hasil pengujian menunjukkan signifikansi sebesar 0,027 dengan koefisien regresi CSRDI sebesar 0,130. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima dan terbukti bahwa pengungkapan TJSL perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui arus kas operasi abnormal pada perusahaan yang tergolong *high-profile*. Bukti empiris ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Kim *et al.* (2012) yang menemukan hubungan positif yang signifikan antara pengungkapan TJSL dan arus kas operasi abnormal. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan *high-profile* di Indonesia cenderung tidak melakukan manajemen laba melalui manipulasi penjualan.

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa pengungkapan TJSL perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui produksi abnormal pada perusahaan yang tergolong *high-profile*. Hasil pengujian menunjukkan signifikansi sebesar 0,390 dengan koefisien regresi CSRDI sebesar -0,108. Hal ini berarti pengungkapan TJSL tidak berpengaruh terhadap manajemen laba melalui produksi abnormal pada perusahaan yang tergolong *high-profile*. Bukti empiris ini tidak mendukung penelitian Kim *et al.* (2012) yang menemukan hubungan negatif yang signifikan antara pengungkapan TJSL dan produksi abnormal. Hasil

pengujian ini dapat terjadi karena apabila perusahaan melakukan pengungkapan TJSL baik itu tinggi atau rendah hal tersebut tidak akan mengurangi ataupun menambah kemungkinan perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan meningkatkan produksi yang berlebihan.

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa pengungkapan TJSL berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui pengeluaran diskresioner abnormal pada perusahaan yang tergolong *high-profile*. Hasil pengujian menunjukkan signifikansi sebesar 0,168 dengan koefisien regresi CSRDI sebesar 0,084. Hal ini berarti pengungkapan TJSL perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba melalui pengeluaran diskresioner abnormal pada perusahaan yang tergolong *high-profile*. Bukti empiris ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Kim *et al.* (2012). Hasil pengujian ini dapat terjadi karena apabila perusahaan melakukan pengungkapan TJSL baik itu tinggi atau rendah hal tersebut tidak akan mengurangi ataupun menambah kemungkinan perusahaan untuk melakukan manajemen laba melalui pengurangan pengeluaran diskresioner seperti biaya iklan, biaya riset dan pengembangan, biaya penjualan, administrasi dan umum.

Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa pengungkapan TJSL berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui kombinasi manipulasi aktivitas riil pada perusahaan yang tergolong *high-profile*. Hasil pengujian menunjukkan signifikansi sebesar 0,457 dengan koefisien regresi CSRDI sebesar 0,058. Hal ini membuktikan bahwa pengungkapan TJSL perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba melalui kombinasi manipulasi aktivitas riil pada perusahaan yang tergolong *high-profile*. Bukti empiris ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Kim *et al.* (2012) yang menemukan hubungan positif yang signifikan antara pengungkapan TJSL dan kombinasi manipulasi aktivitas riil. Hasil pengujian ini dapat terjadi karena apabila perusahaan melakukan pengungkapan TJSL baik itu tinggi atau rendah hal tersebut tidak akan mengurangi ataupun menambah kemungkinan perusahaan untuk melakukan manajemen laba melalui kombinasi manipulasi aktivitas riil.

Alasan lain yang menyebabkan hipotesis ketiga, keempat dan kelima secara empiris tidak terbukti secara statistik adalah walaupun secara rata-rata per-

sahaan industri *high-profile* melakukan pengungkapan TJSL sebesar 66%, namun sampel *high-profile* yang melakukan pengungkapan TJSL secara penuh (100%) sesuai pedoman GRI G3.1 masih sangat sedikit atau kurang dari 10%. Sampel perusahaan yang melakukan pengungkapan TJSL di atas rata-rata industri *high-profile* juga masih sedikit atau kurang dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua industri yang tergolong *high-profile* memiliki kesadaran yang sama untuk melakukan pengungkapan TJSL, sehingga hal ini mempengaruhi hasil pengujian.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan TJSL perusahaan terhadap manajemen laba, baik melalui nilai akrual diskresioner dan manipulasi aktivitas riil pada perusahaan yang tergolong industri *high-profile*. Pengujian statistika dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dengan mengontrol beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi manajemen laba, yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, *market-to-book value*, *growth*, dan auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan TJSL perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui akrual diskresioner pada perusahaan yang tergolong *high-profile* dan pengungkapan TJSL perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui arus kas operasi abnormal pada perusahaan yang tergolong *high-profile*. Namun, penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh pengungkapan TJSL terhadap manajemen laba melalui biaya produksi abnormal, pengeluaran diskresioner abnormal dan kombinasi manipulasi aktivitas riil.

### Saran

Hal-hal yang dapat dikembangkan dan diperbaiki untuk penelitian selanjutnya, antara lain melakukan penambahan jumlah sampel dan tahun penelitian, melakukan pengujian dengan memisahkan atau membedakan antara perusahaan yang banyak mengungkapkan TJSL dan perusahaan yang tidak dan menggunakan proksi atau indikator pengungkapan TJSL yang lain, seperti GRI G.4 dan menambahkan proksi pengungkapan TJSL, seperti biaya aktivitas TJSL perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alsaadi, A., Jaafar, A., & Ebrahim, M. S. (2013). Corporate Social Responsibility, Shariah-Compliant and Earnings Management. *Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference* .
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi Sosial dan Ekonomi serta Perspektif Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. [http://www.jimly.com/makalah/namafile/136/Konstitusi\\_Sosial.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/136/Konstitusi_Sosial.pdf) .
- Beaudoin, C. A., Agoglia, C. P., & Tsakumis, G. T. (2013). Can Corporate Social Responsibility Counteract Personal Incentives to Manage Earnings?: Examining Mechanisms that Influence Managers' Discretionary Accrual Decisions. <http://ssrn.com/abstract=1492288> .
- Boatright, J. R. (2006). What's Wrong and What's Right with Stakeholder Management. *Journal of Private Enterprise* , XXI (2).
- Brooks, L. J., & Dunn, P. (2010). *Business & Professional Ethics for Directors, Executives & Accountants* (5th ed.). USA: South-Western, Cengage Learning.
- Chen, H., Chen, J. Z., Lobo, G. J., & Wang, Y. (2010). Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital: Evidence from China. <http://ssrn.com/abstract=1105539> .
- Chih, H. L., Shen, C. H., & Kang, F. C. (2008). Corporate social responsibility, investor protection, and earnings management: some international evidence. *Journal of Business Ethics* , 179-198.
- Choi, B. B., Lee, D., & Park, Y. (2013). Corporate Social Responsibility, Corporate Governance and Earnings Quality: Evidence from Korea. *Corporate Governance: An International Review* , 21 (5), 447-467.
- Demerjian, P., Lewis, M., & McVay, S. (2014). Earnings Smoothing: For Good or Evil? <http://ssrn.com>

- com/abstract=2426313* .
- Elkington, J. (1998). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st-Century Business*. John Wiley & Sons , 37-51.
- Fan, O. (2013). The Interaction between Corporate Social Responsibility and Earnings Management. *Amsterdam Business School* .
- Ferrel, O. C., Fraedrich, J., & Ferrel, L. (2008). *Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases* (7th ed.). USA: South-Western, Cengage Learning.
- Ferrero, J. M., Banerjee, S., & Sanchez, I. M. (2013). Corporate Social Responsibility as a Strategic Shield Against Costs of Earnings Management Practices. *http://ssrn.com/abstract=2423905* .
- Garriga, E., & Mele, D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. *Journal of Business Ethics* , 53, 51-71.
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons* , 13 (4), 365-283.
- Ioannou, I., & Serafeim, G. (2011). The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting. *http://ssrn.com/abstract=1799589* .
- Kim, Y., Park, M. S., & Wier, B. (2012). Is Earnings Quality Associated with Corporate Social Responsibility? *The Accounting Review* , 87 (3), 761-796.
- Kothari, S., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance Matched Discretionary Accrual Measures. *Journal of Accounting and Economics* , 39, 163-197.
- Mohamad, N. R., Abdullah, S. N., Mokhtar, M. Z., & Nik Kamil, N. F. (2013). The Effects Of Board Independence, Board Diversity and Corporate Social Responsibility On Earnings Management. Available at SSRN: *http://ssrn.com/abstract=1725925* or *http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1725925* .
- Mulford, C. W., & Comiskey, E. E. (2002). *The Financial Numbers Game: Detecting Creative Accounting Practices*. Canada: Wiley.
- Prior, D. S. (2008). Are socially responsible managers really ethical? Exploring the relationship between earnings management and corporate social responsibility. *Corporate Governance* , 160-177.
- Purwamitha, A. M. (2011). Hubungan Corporate Social Disclosure dan Earnings Management: Studi Empiris berdasarkan Political Cost Hypothesis. *Skrripsi Universitas Diponegoro* .
- Pyo, G., & Lee, H.-Y. (2013). Corporate Donation, Voluntary Disclosure, and Earnings Quality of Blockholder shared Firms. *International Conference on Business, Economics, and Accounting* .
- Pyo, G., & Lee, H.-Y. (2013). The Association Between Corporate Social Responsibility Activities And Earnings Quality: Evidence From Donations And Voluntary Issuance Of CSR Reports. *The Journal of Applied Business Research* , 29 (3).
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings Management through Real Activities Manipulation. *Journal of Accounting and Economics* , 42, 355-370.
- Salewski, M., & Z`ulch, H. (2013). The Association between Corporate Social Responsibility (CSR) and Earnings Quality - Evidence from European Blue Chips. *HHL Working Paper Series No.112*. *http://ssrn.com/abstract=2141768* .
- Scott, W. R. (2009). *Financial Accounting Theory* (6th ed.). Toronto, Ontario: Pearson Prentice Hall.
- Sembiring, E. R. (2005). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *SNA VIII* .

Setyorini, C. T., & Ishak, Z. (2012). Corporate Social and Environmental Disclosure: A Positive Accounting Theory. *International Journal of Business and Social Science* , 3 (9).

Solihin, I. (2009). *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukrisno Agoes, I. C. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.

Wang, J., Song, L., & Yao, S. (2013). The Determinants Of Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence From China. *The Journal of Applied Business Research* , 29 (6).

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Yip, E., Staden, C. V., & Cahan, S. (2011). Corporate Social Responsibility Reporting and Earning Management: The Role of Political Costs. *Australasian Accounting Business and Finance Journal* , 5 (3), 17-34.